

LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diimplinya.

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam usaha mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Jambi, Februari 2020
Inspektur,



Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum.
NIP. 19601023 198903 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	2
Laporan Operasional	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR	
PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	10
2.1. Ekonomi Makro	10
2.2. Kebijakan Keuangan.....	10
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar.....	14
4.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	15
4.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	15
4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	15
4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja	16
4.6. Kebijakan Akuntansi Beban	16

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	17
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca	21
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	25
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
BAB VI PENUTUP	28

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Februari 2020
Inspektur,



Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum.
NIP. 19601023 198903 1 002



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Per 31 December 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.295.600,00	2.685.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.295.600,00	2.685.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.162.547.024,90	6.361.111.357,90
Gedung dan Bangunan	2.969.031.552,00	2.724.698.552,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.970.000,00	19.970.000,00
Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(8.648.736.528,69)	(8.023.634.216,93)
JUMLAH ASET TETAP	1.526.627.957,21	1.105.961.601,97
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	792.796.690,40	792.796.690,40
Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
URAIAN	2019	2018
JUMLAH ASET LAINNYA	792.796.690,40	792.796.690,40
JUMLAH ASET	2.320.720.247,61	1.901.443.292,37
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor	15.412.420,00	15.127.527,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.412.420,00	15.127.527,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	15.412.420,00	15.127.527,00
EKUITAS		
EKUITAS	2.305.307.827,61	1.886.315.765,37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.320.720.247,61	1.901.443.292,37

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Unit Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019



Ususan Pemerintahan : 4 Ususan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4.02 Pengawasan

Unit Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah Provinsi

Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah Provinsi

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA	27.902.411.295,00	25.295.445.487,00	(2.606.965.808,00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.565.211.295,00	12.962.657.588,00	(1.602.553.707,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	14.565.211.295,00	12.962.657.588,00	(1.602.553.707,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	13.337.200.000,00	12.332.787.899,00	(1.004.412.101,00)
2.2.1	Belanja Pegawai	788.944.800,00	631.109.300,00	(157.835.500,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.278.353.250,00	10.647.920.102,00	(630.433.148,00)
2.2.2	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	11.278.353.250,00	10.647.920.102,00	(630.433.148,00)
2.2.3	Belanja Modal	1.269.901.950,00	1.053.758.497,00	(216.143.453,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.902.411.295,00)	(25.295.445.487,00)	2.606.965.808,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(27.902.411.295,00)	(25.295.445.487,00)	2.606.965.808,00

Jambi, 31 Desember 2019

Inspektur

Dr. H. KAILANI, SH, M.Hum

NIP. 19601023 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Ususan Pemerintahan : 4 Bidang Pemerintahan : 4.02 Unit Organisasi : 4.02.01 Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01						Ususan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Inspektorat Daerah Provinsi					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)						
KEGIATAN OPERASIONAL											
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
8.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	BEBAN	24.529.914.251,30	20.355.769.099,04	4.173.145.152,26	20,50						
9.1.1	Beban Pegawai - LO	12.962.657.588,00	10.189.067.321,00	2.773.590.267,00	27,22						
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	11.280.703.695,00	9.633.676.470,00	1.647.027.225,00	17,10						
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	286.552.968,30	534.025.308,04	(247.472.339,74)	(86,34)						
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00						
LAPORAN OPERASIONAL				Halaman 1 dari 2							

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4.02 Pengawasan Unit Organisasi : 4.02.01 Inspektorat Daerah Provinsi Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01 Inspektorat Daerah Provinsi					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(24.529.914.251,30)	(20.356.769.099,04)	(4.173.145.152,26)	20,50
8.4.1	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.2	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(24.529.914.251,30)	(20.356.769.099,04)	(4.173.145.152,26)	20,50
8.5.1	POS LUAR BIASA				
9.4.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.529.914.251,30)	(20.356.769.099,04)	(4.173.145.152,26)	20,50

Jambi, 31 Desember 2019
Inspektur

Dr. H. KAILANI, SH, M.Hum
NIP. 19601023 198903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan		
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat Daerah Provinsi		
URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	1.886.315.765,37	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.529.914.251,30)	(20.356.769.099,04)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	(29.092.600,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.295.445.487,00	20.125.196.840,00
EKUITAS AKHIR	2.622.754.401,07	(231.572.259,04)

Jambi, 31 Desember 2019

Inspektur

Dr. H. KAILANI, SH, M.Hum

NIP. 19601023 198903 1 002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB III. Kebijakan Akuntansi

BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1.4. Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat berkomitmen dengan visi "Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional dan

berintegritas dalam rangka mengawal terwujudnya Jambi TUNTAS 2021”
didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Administrasi, Keuangan dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- f. Jabatan Fungsional.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2017 dan pada tahun 2018.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2019 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2019.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inpektorat Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SKPD/NAMA PROGRAM/ URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN	
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN	
					Rp.	%
Inspektorat Daerah Provinsi						
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.218.841.900,00	-4.681.500,00	2.214.160.400,00	2.151.817.351,00	97,18
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.585.500,00	99,78
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	219.600.000,00	31.800.000,00	251.400.000,00	200.710.044,00	79,84
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.060.000,00	5.000.000,00	8.060.000,00	7.669.600,00	95,16
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	336.364.000,00	0,00	336.364.000,00	332.854.043,00	98,96
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	137.538.800,00	0,00	137.538.800,00	131.672.800,00	95,74
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.780.200,00	3.042.000,00	28.822.200,00	28.822.200,00	100,00
7	Penyediaan alat tulis kantor	92.454.500,00	1.711.500,00	94.166.000,00	94.109.200,00	99,94
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.415.900,00	10.665.000,00	76.080.900,00	75.968.250,00	99,85
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	34.864.500,00	-18.000.000,00	16.864.500,00	16.864.500,00	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan perunturan perundang-undangan	54.200.000,00	-38.900.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	144.931.830,00	99,95
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.097.964.000,00	0,00	1.097.964.000,00	1.096.329.384,00	99,85
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.568.725.600,00	57.786.600,00	1.626.512.200,00	1.500.099.497,00	92,23
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	450.000.000,00	-10.738.500,00	439.261.500,00	439.261.500,00	100,00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	135.470.000,00	37.058.650,00	172.528.650,00	161.647.097,00	93,69
3	Pengadaan mebeleur	7.500.000,00	70.297.600,00	77.797.600,00	66.687.600,00	85,72
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	403.050.000,00	0,00	403.050.000,00	336.650.000,00	83,53
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	69.500.000,00	-2.000.000,00	67.500.000,00	64.712.000,00	95,87
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100.496.000,00	218.226.150,00	318.722.150,00	289.312.000,00	90,77
7	Pengadaan komputer	24.000.000,00	123.652.300,00	147.652.300,00	141.829.300,00	96,06
3. Program peningkatan disiplin aparatur		49.500.000,00	6.750.000,00	56.250.000,00	56.199.272,00	99,91
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	49.500.000,00	6.750.000,00	56.250.000,00	56.199.272,00	99,91
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHI		8.135.812.500,00	412.882.200,00	8.548.694.700,00	7.833.884.492,00	91,64
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	2.594.143.700,00	0,00	2.594.143.700,00	2.577.961.799,00	99,38

2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	210.034.000,00	0,00	210.034.000,00	168.472.200,00	80,21
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDHI	2.348.418.700,00	0,00	2.348.418.700,00	2.324.082.481,00	98,96
4	Inventarisasi temuan pengawasan	48.105.000,00	0,00	48.105.000,00	43.868.058,00	91,19
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	1.104.513.900,00	-49.670.000,00	1.054.843.900,00	1.029.198.130,00	97,57
6	Gelar Pengawasan dan rapat koordinasi daerah tahun 2019	625.171.000,00	0,00	625.171.000,00	604.514.845,00	96,70
7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	167.025.200,00	-38.180.000,00	128.845.200,00	125.597.734,00	97,48
8	Sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGGLI)	1.038.401.000,00	0,00	1.038.401.000,00	927.040.745,00	89,28
9	Kegiatan Survei Penilaian Integritas	0,00	135.484.300,00	135.484.300,00	33.148.500,00	24,47
10	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	365.247.900,00	365.247.900,00	0,00	0,00
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		643.746.000,00	138.327.700,00	782.073.700,00	710.277.468,00	90,82
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	488.662.000,00	70.327.700,00	558.989.700,00	527.091.068,00	94,29
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	155.084.000,00	68.000.000,00	223.084.000,00	183.186.400,00	82,12
7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		220.574.000,00	-111.065.000,00	109.509.000,00	80.509.819,00	73,52
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	220.574.000,00	-111.065.000,00	109.509.000,00	80.509.819,00	73,52
JUMLAH		12.837.200.000,00	500.000.000,00	13.337.200.000,00	12.332.787.899,00	92,47

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo

akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya
 - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Pos Aset Lainnya pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Pos Kewajiban pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

3.6. Kebijakan Akuntansi Beban

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar Rp 24.075.337.138,00 di tambah sebesar Rp 3.827.074.157,00 sehingga pagu anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp 27.902.411.295,00 incian Pagu Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
PENDAPATAN		
Total Pendapatan	0,00	0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG		
Belanja Pegawai	11.238.137.138,00	14.565.211.295,00
BELANJA LANGSUNG		
Belanja Pegawai	789.424.800,00	788.944.800,00
Belanja Barang dan Jasa	10.963.491.600,00	11.278.353.250,00
Belanja Modal	1.084.283.600,00	1.269.901.950,00
Total Belanja	24.075.337.138,00	27.902.411.295,00

sedangkan apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Program	Jumlah Pagu	
	Awal (Rp)	Revisi (Rp)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.218.841.900,00	2.214.160.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.568.725.600,00	1.626.512.200,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49.500.000,00	56.250.000,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	8.135.812.500,00	8.548.694.700,00
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	643.746.000,00	782.073.700,00
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur	220.574.000,00	109.509.000,00
JUMLAH	12.837.200.000,00	13.337.200.000,00

4.1.1. Pendapatan LRA

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2. Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan di Inspektorat Provinsi Daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2019 sebesar Rp 27.902.411.295,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 25.295.445.487,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran2019 (Rp)	Realisasi2019 (Rp)	%
5	BELANJA			
5.1	Belanja Operasi	26.632.509.345,00	24.241.686.990,00	90,66
5.1.1	Belanja Pegawai	15.354.156.095,00	13.593.766.888,00	91,02
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.278.353.250,00	10.647.920.102,00	93,47
5.2	Belanja Modal	1.269.901.950,00	1.053.758.497,00	82,98
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.774.550,00	809.425.497,00	80,96
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.577.400,00	244.333.000,00	94,86
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.550.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		27.902.411.295,00	25.295.445.487,00	90,66

Realisasi Belanja tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.170.248.647,00 di bandingkan tahun anggaran 2018 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Rp
	TA 2019	TA 2018	
BELANJA OPERASI	24.241.686.990,00	19.784.038.640,00	4.457.648.350,00
Belanja Pegawai	13.593.766.888,00	10.189.067.321,00	3.404.699.567,00
Belanja Barang dan Jasa	10.647.920.102,00	9.594.971.319,00	1.052.948.783,00
BELANJA MODAL	1.053.758.497,00	341.158.200,00	712.600.297,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	809.425.497,00	341.158.200,00	468.267.297,00
Belanja Gedung dan Bangunan	244.333.000,00	0,00	244.333.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.550.000,00	0,00	12.550.000,00
Jumlah	25.295.445.487,00	20.125.196.840,00	5.170.248.647,00

4.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahpusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.026.150.143,00	6.355.727.433,00	90,46
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.914.533.994,00	3.833.339.888,00	97,93
Jumlah	10.940.684.137,00	10.189.067.321,00	93,13

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 10.189.067.321,00 dan Rp 8.917.192.539,00. Kenaikan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 1.271.874.782,00 atau 14,26 %, karena terdapat pembayaran TPP ke 13 dan 14 serta penambahan pegawai pada tahun yang berjalan. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.143.296.202,00	6.355.727.433,00	787.568.769,00	12,39
Belanja TPP	5.957.376.166,00	3.833.339.888,00	2.124.036.278,00	55,41
Jumlah	13.100.672.368,00	10.189.067.321,00	2.911.605.047,00	28,58

b. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	11.278.353.250,00	10.647.920.102,00	94,41 %

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 11.278.353.250,00 dan Realisasi Rp 10.647.920.102,00 dan Kenaikan Realisasi

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.658.565.583,00 atau 18,45 %. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa	10.647.920.102,00	8.989.354.519,00	1.658.565.583,00	18,45

4.1.2.2. Belanja Modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	999.774.550,00	809.425.497,00	80,96
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.577.400,00	244.333.000,00	94,86
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.550.000,00		
Jumlah	1.269.901.950,00	1.053.758.497,00	90,66

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 1.053.758.497,00 dan Rp 341.158.200,00 Kenaikan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 712.597.297,00 atau 208,88 %. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2019	TA 2018	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	809.425.497,00	341.158.200,00	468.267.297,00	137,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244.333.000,00	0,00	244.333.000,00	0,00
Jumlah	1.053.758.497,00	341.158.200,00	712.597.297,00	208,88

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel sebagai berikut:

1	Mesin Penghancur Kertas	Secure	1	2.023.200,00
2	Mesin Faximile	Panasonic KX-FT987CX	1	2.774.600,00
3	Exhaust Fan	Maspion CEF-25	4	1.200.000,00
4	Air Conditioning / AC Split	Sharp AU-A9SAY	3	11.475.000,00
5	Lemari Es	Polytron CFC-Free	1	2.250.000,00
6	Dispenser	Miyako WD-389 HC	1	670.000,00
7	Wireless meeting + mic sony	Sony SN-87	1	4.950.000,00
8	TV Led	Sharp LC-40SA51001	1	3.500.000,00
9	Tiang Microphone	-	1	300.000,00
10	PC all in one	Asus	1	8.373.300,00
11	Printer	Epson	7	13.680.000,00
12	Kamera	Canon EOS80DL135	1	24.684.700,00
13	Mobil dinas X-Trel	Nissan	1	439.261.500,00
14	TV 17"	Sony	1	46.501.362,00
15	Exhaust Fan	Maspion	2	600.000,00
16	Katel Listrik /Electric Cattle	Qd Stanlis	1	260.000,00
17	Dispenser Miyako	Miyako 38D	1	670.000,00
18	Brankas	Lion L860	1	22.091.535,00
19	white Board	SP.KWT white board 1 muka	1	1.500.000,00
20	Mesin Fax	Fax Panasonic FT 987	1	1.672.500,00
21	Proyektor/Infokus	120 motorize 244x183	1	3.289.200,00
22	Racun Api	viking 9kg powder	11	13.090.000,00
23	Karpet Musholah	-	1	2.120.000,00
24	Sajadah Musholah	-	3	3.680.000,00
25	Home Theater	Pioner blueray HTZ 222BD	1	4.900.000,00
26	Rak Arsip	rak besi siku lobang	20	20.000.000,00
27	Jam Dinding	-	2	200.000,00
28	Sendok Makan	-	1	680.000,00
29	Cangkir	-	3	1.155.000,00
30	Meja dan Kursi Kerja	-	1	7.500.000,00
31	Meja Pimpinan	-	1	2.615.000,00
32	Meja Satgas	-	7	13.755.000,00
33	Meja Rapat	-	1	13.487.500,00
34	Kursi Pimpinan	-	1	1.874.400,00
35	Kursi Kerja Satgas	-	7	9.508.100,00
36	Kursi Rapat	-	8	3.357.600,00
37	Laptop Apple	Apple	1	30.000.000,00
38	Ipad	Apple	1	13.998.000,00
39	USB Apple	Apple	1	1.599.000,00
40	Hardisk Eksternal	WD	1	1.394.000,00
41	Laptop	vivobook	1	13.000.000,00
42	Infokus/Proyektor	Projektor IN2124X	1	16.975.000,00
43	Scanner	Epson	3	42.810.000,00
JUMLAH			110	809.425.497,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019

1	Belanja Modal Gedung Kantor	94.900.000,00
2	Belanja Modal Rehab Ruang KPK	139.543.000,00
3	Belanja Modal Rehab Taman Kantor	9.890.000,00
	JUMLAH	244.333.000,00

4.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

4.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 1.901.443.292,37 dan Rp 2.137.796.317,41. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2019 dan 2018**

Keterangan	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset Lancar:		
Persediaan	1.295.600,00	2.685.000,00
Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Jumlah	1.295.600,00	2.685.000,00

4.2.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp 1.295.600,00 dan Rp 2.685.000. Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. dikarenakan terdapat penurunan nilai Persediaan sebesar Rp 1.295.600,00. Rincian persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	ATK	1.032.100,00	1.786.400,00
2	Barang Cetak		332.500,00
3	Alat Listrik		120.700,00
4	Alat Kebersihan	263.500,00	445.400,00
	Jumlah	1.295.600,00	2.685.000,00

4.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 1.844.074.530,67 dan Rp 1.105.961.601,97 Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	7.162.547.024,90	6.361.111.357,92
2	Gedung dan Bangunan	2.969.031.552,00	2.724.698.552,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.970.000,00	19.970.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	23.815.909,00	23.815.909,00
	Nilai Perolehan	10.175.364.485,90	9.129.595.818,92
	Akumulasi Penyusutan	(8.648.736.528,69)	(8.023.634.216,93)
	Nilai Buku	1.526.627.957,21	1.105.961.601,97

4.2.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 7.162.547.024,90 dan Rp 6.361.111.357,92, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya sebesar Rp 726.346.690,40. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 8.648.736.528,69 sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.361.111.357,90
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	780.332.897,00
Mutasi dari Bakeuda	21.102.770,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	7.162.547.024,90
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	5.656.061.211,02
Nilai Buku per 31 Desember 2018	1.506.485.813,88

4.2.2.2. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 2.724.698.552,00 dan 2.724.698.552,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.171.124.188,06. sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 553.574.363,94.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	2.724.698.552,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244.333.000,00
Nilai Perolehan per 31 per 31 Desember 2019	2.969.031.552,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	2.259.838.377,27
Nilai Buku per 31 Desember 2019	709.193.174,73

4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 19.970.000,00 dan Rp19.970.000,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.991.000,00 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 13.979.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	19.970.000,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	6.490.250,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	13.479.750,00

4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 23.815.909,00 dan Rp23.815.909,00. Aset Tetap Lainnya merupakan koleksi buku perpustakaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 8.648.736.528,69 dan Rp 8.023.634.216,93. Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Instalasi dan Aset lain-lain.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.656.061.211,02
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.259.838.377,27
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.490.250,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	726.346.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	8.648.736.528,69

4.2.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 792.796.690,40 dan Rp 792.796.690,40. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 726.346.690,40 sehingga nilai buku Aset Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp 64.450.000. Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	792.796.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	726.346.690,40
Nilai Buku per 31 Desember 2019	64.450.000,00

4.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 15.412.420,00 dan Rp 15.127.527,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Belanja Air	585.500,00	758.400,00
2	Belanja Telepon	753.300,00	1.813.216,00
3	Belanja Listrik	13.149.960,00	12.156.111,00
4	Belanja Telepon	923.660,00	399.800,00
	Jumlah	15.412.420,00	15.127.527,00

4.2.5. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 2.305.307.827,61 dan Rp 1.886.315.765,37 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

4.3.1. Pendapatan-LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2. Beban

Jumlah Beban tahun 2019 dan 2018 masing-masing Rp 24.529.914.251,30 dan Rp 20.356.769.099,04. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2019	2018	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	12.962.657.588,00	10.189.067.321,00	2.773.590.267,00	27,22
Beban Barang dan Jasa	11.280.703.695,00	9.633.676.470,00	1.647.027.225,00	17,10
Beban Penyusutan	625.102.311,76	534.025.308,04	91.077.003,72	17,05
Jumlah	24.868.463.594,76	20.356.769.099,04	4.511.694.495,72	22,16

4.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 12.962.657.588,00 dan Rp 10.189.067.321,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

4.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 9.596.057.253,00 dan Rp 7.785.940.388,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2019	2018	Jumlah	%
Belanja Persediaan	1.050.075.702,00	860.469.040,00	180.707.209,00	22,04
Belanja Jasa	1.234.121.237,00	1.120.763.221,00	113.358.016,00	10,11
Belanja Pemeliharaan	492.566.043,00	463.127.510,00	29.438.533,00	6,36
Belanja Perjalanan Dinas	8.503.940.713,00	7.189.316.699,00	1.314.624.014,00	18,29
Jumlah	11.280.703.695,00	9.633.676.470,00	1.647.027.225,00	17,10

4.3.2.3. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 286.552.968,30 dan Rp 534.025.308,04. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan disajikan sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2019	2018	Jumlah	%
Beban Penyusutan	617.665.951,05	534.025.308,04	83.640.643,01	15,66

4.3.3. Surplus/Defisit-LO

Defisit tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 24.861.027.234,05 dan Rp 20.356.769.099,04. Jumlah per 31 Desember 2019 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp 4.504.258.135,01

4.4. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 2.305.307.827,61 dan Rp. 1.886.315.765,37

4.4.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 24.868.463.594,76 dan Rp 20.356.769.099,04. Jumlah per 31 Desember 2019 merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp 24.868.463.594,76 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.

4.4.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.305.307.827,61 dan Rp 1.886.315.765,37. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp 2.320.720.247,61 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp 15.412.420,00.